## TAJUK RENCANA

# 'Nglithih' Harus Ditindak Tegas

**AKSI** *nglithih* kembali terjadi Senin (12/12), 7 siswa SMA swasta di Yogyakarta tertebas pedang oleh sekelompok orang bercadar di kawasan jalan Imogiri. Belum ada keterangan baku soal kata *nglithih* (Bhs Jawa). Ini idiom yang sangat 'lokal' . Besar kemungkinan kata tersebut termasuk frasa yang sulit dideskripsikan. Sulit dicari padanan dalam Bahasa Indonesia atau bahasa asing. Para pakar Bahasa Jawa menjabarkan *nglithih* sebagai aktivitas keluar rumah untuk berburu makanan saat malam hari (di warung luar rumah). Sekaligus *sanja* (gaul, ngobrol) dengan tetangga.

Namun kini, *nglithih* berubah makna: semacam gang, tim atau grup yang siap tawuran. Tak lagi malam hari. Bahkan demonstratif siang hari sepulang sekolah berputar keliling mengendarai motor mencari 'mangsa' dari murid sekolah yang dianggap rival. Tragisnya, mereka dapat melakukan kekerasan tanpa sebab riil. Perilaku *hantam krama*, asal babat, tawur keroyokan - itulah yang sangat meresahkan masyarakat. Khususnya, para orangtua yang memiliki anak remaja.

Jika beberapa tahun lalu, Yogyakarta juga dilanda fenomena perkelahian pelajar yang masih bersifat kenakalan pelajar. Ketika perkelahian menjadi tawuran pelajar, para pakar psikologi pendidikan mengatakan meningkatnya kualitas dengan penggunaan benda-benda tajam seperti pisau, belati, gir sepeda, rantai untuk mencederai lawan. Kini menjadi *nglithih* yang jika melihat bobot dampak sebagai akibat aktivitas itu, merupakan 'dosis tinggi' dari perkelahian dan tawuran.

Kualitas aksi *nglithih* yang menggunakan alat-alat yang dapat melukai, merusak, mencederai bahkan menewaskan - juga melihat betapa ringan hati memukul, menendang, menggebuk, melukai orang lain - bahkan seolah puas jika melihat darah atau lawan sekarat - timbul pertanyaan: apa yang sedang terproses dalam psikologis mereka? Kompleksitas perilaku agresif mereka, mendesak perlu dibahas, kajian dan solusi yang mendesak. Kembali ada upaya mendefinisikan dan rekonstruksi tentang berbagai variabel seperti kondisi orangtua, lingkungan tinggal, dan atmosfer sekolah.

Sekalipun para pelaku dan korban masih berstatus pelajar atau bekas pelajar, tak relevan lagi jika *nglithih* hanya persoalan dunia pendidikan. Tiga tiang utama: orangtua, sekolah dan lingkungan - harus dipertanyakan: manakah tiang yang kini pincang, sehingga tak lagi imbang menopang kognisi, afeksi dan perilaku peserta didik. Tiga tiang pendidikan itu, bukanlah dunia yang terpisah. Tetapi ibarat pohon, tangkai dan daun. Atau, ibarat ikan dan air.

Untuk antisipasi dan solusi perilaku anak-anak yang makin mengkhawatirkan, perlu pemikiran baru yang kooperatif antara tiga tiang pendidikan tersebut. Selanjutnya, implementasi operasional yang tegas harus dibakukan. Secara umum, perlu kesadaran dari khalayak dewasa untuk berperilaku santun dan jauh dari kekerasan - sebab semua perilaku dapat menjadi model bagi kalangan remaja. Apalagi media sosial berkembang bebas nilai dan media konvensional, semakin jauh dari fungsi informasi akurat dan mendidik.

Secara spesifik, Yogyakarta harus bebas dari tindak kekerasan dalam bentuk apa pun. Seperti ditegaskan Gubernur DIY Sri Sultan HB X dalam apel Forum Tiga Pilar (Sabtu 10/12) di hadapan Babinkamtibmas dan Babinsa. Bahwa masyarakat diminta ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Jika ada kelompok yang potensial mengganggu ketertiban harus segera dilaporkan. Tindak tegas pelaku *nglithih*. ❑ - g

# Hukum Makar di Negara Demokrasi

**Agus Riewanto**

**KEPOLISIAN** Daerah (Polda) Metro Jaya DKI Jakarta telah menangkap 11 orang aktivis kritis yang diduga akan melakukan tindakan makar. (*Kedaulatan Rakyat*, 3/12). Penangkapan 11 orang tokoh kritis ini - kini sebagian sudah dilepas -- sempat menjadi *tranding topic* di media sosial dan memantik perdebatan hangat di tengah masyarakat.

Pada umumnya publik mempertanyakan tentang kebenaran akan fakta adanya tindakan makar. Namun juga menggugat tentang keganjilan (anomali) demokrasi yang mensyaratkan adanya kebebasan warga negara untuk berserikat dan berpendapat secara kritis dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945.

Makar merupakan istilah hukum yang diadopsi di dalam KUHP yang antara lain dinyatakan melalui Pasal 87 yang mensyaratkan makar dengan adanya perbuatan permulaan pelaksanaan; Pasal 104 (membunuh, merampas kemerdekaan, meniadakan kemampuan presiden dan wapres memerintah); Pasal 106 (memisahkan diri dari wilayah negara Indonesia); dan Pasal 107 (menggulingkan pemerintah). Konstruksi ketentuan makar dalam keempat pasal ini menegaskan, bahwa makar adalah kegiatan politik yang terorganisasi yang melibatkan sejumlah kalangan dengan paksaan, kekerasan, bahkan membunuh agar suatu dapat memisahkan diri dari NKRI dan menggulingkan kekuasaan politik pemerintahan yang telah berkuasa secara sah dengan paksa.

**Asumsi Politik**

Karena itu makar merupakan tindakan politik yang berakibat pada pelanggaran terhadap hukum pidana. Pembuktian kebenaran akan tindakan makar juga harus berdasarkan konstruksi Pasal 184 KUHAP. Tidak boleh berdasarkan asumsi-asumsi politik karena makar adalah tindakan hukum yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara yang sah.

Makar ini identik dengan kudeta yang merupakan tindakan politik perubahan cepat, radikal, menyeluruh dan berjangka pendek, dengan menyingkirkan seluruh sistem bernegara lama untuk digantikan dengan sistem bernegara yang baru. Makar identik dengan kudeta yang acap kali disertai dengan kekerasan dan korban yang banyak diakibatkan oleh situasi

KR-JOKO SANTOSO

*anomie* yakni sebuah situasi kekosongan sistem, karena sistem lama telah hilang karena revolusi, namun sistem baru belum ditemukan secara mapan. Situasi ini acapkali mendorong lahirnya ketidakpastian politik dan dalam situasi yang transisi dari era lama menuju era baru.

Menurut Thomas H Greene (1974) sejak tahun 1960-an makar yang berhasil menggulingkan pemerintah hanya dapat melalui jalan revolusi sebagai perubahan yang relatif mendadak dan signifikan. Adapun elemen-elemen dasar revolusi politik adalah, adanya (1) pemimpin progresif baik individu maupun kolektif; (2) adanya partai progresif yang mampu menjalani peran sebagai partai pelopor (*avant garde*), (3) adanya elemen ideologi; (4) adanya metode dan perangkat aksi dan dukungan eksternal.

**Elemen 'Cyber'**

Karena itu, tindakan makar sepanjang memenuhi prasyarat ini besar kemungkinan akan berhasil menggantikan pemerintah yang sah. Jika tak dapat memenuhi persyaratan ini kecil kemungkinan akan berhasil. Jika merujuk pada situasi politik mutakhir akhir-akhir ini jelas tak terjadi. Itulah sebabnya dugaan tindakan makar pada 11 orang tokoh kritis yang ditangkap Polda Metro Jaya ini perlu dibuktikan secara hukum kebenarannya.

Di era demokrasi berbasis internet ini sesungguhnya semua tindakan warga negara dapat dipantau melalui elemen-elemen *cyber* dan akuntabilitas setiap kegiatan politik warga negara atau sekelompok warga negara dapat dikontrol oleh publik. Jadi dugaan tindakan makar oleh 11 tokoh kritis ini harusnya di baca dalam dua konteks: *Pertama*, mungkin saja kegiatan politiknya selama ini hanyalah merupakan bentuk kritik keras terhadap pemerintahan yang sah. *Kedua*, tak menutup kemungkinan pula bahwa kegiatan politiknya selama ini hanyalah merupakan tindakan provokatif yang berpotensi menebar kebencian terhadap pemerintah melalui media sosial. Keduanya tak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan makar. ❑ - g

*) ***Dr Agus Riewanto SH MA***
*Pengajar Fakultas Hukum dan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.*

**Maksimum 600 Kata**

**PARA** pengirim naskah Opini KR harap membatasi panjang naskah maksimum 4.000 karakter atau setara sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat dan nomor telepon. Naskah harap dikirim ke alamat email opinikr@gmail.com

# Merajut Kembali Toleransi

**Hamdan Daulay**

**SEJARAH** mencatat, Bangsa Indonesia yang plural, memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Dasar negara Pancasila dan semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika', menjadi modal penting dalam mewujudkan kerukunan di tengah pluralitas yang ada. Sejarah juga mencatat bagaimana kebesaran jiwa tokoh Islam yang rela menghapus tujuh kata dari sila pertama dalam piagam Jakarta demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Awalnya sila pertama Pancasila dalam konsep piagam Jakarta berbunyi : *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari' at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Setelah tujuh kata tersebut dihapus, maka sila pertama Pancasila menjadi, *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Menurut Alamsyah Ratu Perwiranegara, kerelaan tokoh-tokoh Islam menghapaus tujuh kata dalam sila pertama Pancasila adalah merupakan sumbangan luar biasa dalam mewujudkan kokohnya persatuan bangsa.

**Potensi Konflik**

Namun sejarah juga mencatat, setelah 71 tahun Indonesia merdeka masih ada potensi-potensi konflik yang mengusik kerukunan di tengah masyarakat. Intoleransi antarumat beragama masih terus terjadi di berbagai daerah karena berbagai alasan. Bahkan intoleransi tersebut sampai pada kebencian yang mendalam dan bahkan perusakan tempat ibadah. Konflik umat beragama yang terjadi di Ambon, Poso, Sampit, Tolikara (Papua), hingga penistaan agama menjadi kegaduhan luar biasa yang menyedot energi bangsa ini.

Sejatinya masyarakat Indonesia yang plural selalu mendambakan kerukunan, kedamaian, toleransi dan saling menghargai. Toleransi tidak hanya sekadar retorika, namun sudah teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Di berbagai daerah di Nusantara, hubungan umat beragama telah lama terjalin dengan harmonis dan toleran. Bahkan budaya gotong royong yang begitu kuat di masyarakat telah mampu merajut tali toleransi.

Multikultural merupakan istilah yang memerlukan penjelasan teoretis tentang bagaimana suatu kehidupan yang rukun dalam suatu masyarakat majemuk dapat terwujud. Kalangan ilmuan sosial mengajukan beberapa pandangan. Menurut Gerald A Arbuckle, kehidupan multikultural bukan merupakan suatu perintah melainkan tumbuh dari kesadaran. Dalam definisi tersebut Arbuckle juga menolak adanya anggapan bahwa multikulturalisme merupakan penemuan dari beberapa orang ahli.

Dua hal yang ditolaknya, perintah dan ide beberapa ilmuwan, mengakibatkan pandangan bahwa multikulturalisme merupakan gerakan dari bawah dan melibatkan semua lapisan masyarakat. Di mata Arbuckle, multikulturalisme dengan demikian merupakan bentuk inkulturasi karena budaya dengan cepat berubah sendiri dan membentuk sesuatu yang baru. Perubahan terjadi karena keterlibatan semua komponen dalam struktur yang berperan, sehingga bentuk kehidupan multikultural terwujud.

**Interaksi**

Sementara itu Francis Fukuyama menyebutkan bahwa *social capital* adalah eksistensi seperangkat tata nilai atau norma yang disepakati dan diterapkan bersama antaranggota kelompok yang memungkinkan terjadinya kerja sama. Apabila anggota suatu kelompok masyarakat mengharapkan anggota kelompok lain berperilaku seperti yang dilakukan maka harus ada sikap saling percaya satu sama lain. Secara lebih gamblang dijelaskan Putnam (dalam Fukuyama, 1999) bahwa *social capital* mengacu pada *collective values of all social networks*.

Bagi Fukuyama *social capital* sangat berperan dalam proses interaksi yang didasari dan akhirnya mengarah pada suatu bentuk multikulturalisme. Seperti halnya Arbuckle, Fukuyama mengakui bahwa manusia dengan sadar akan menggunakan *social capital*-nya menuju suatu bentuk struktur sosial yang lebih baik didasarkan pada nilai-nilai dan norma sosial yang disepakati mereka. Perangkat dinamis dari semua nilai dan norma sosial ini mencerminkan kondisi kehidupan multikultural.

Bagi Bangsa Indonesia, pluralitas baik dari aspek agama, budaya, aliran, etnis dan lain-lain, bisa menjadi potensi kerukunan dan juga bisa menjadi potensi konflik. Manakala persoalan pluralitas ini dikelola dengan baik, akan bisa menjadi potensi kerukunan. Sebaliknya manakala persoalan pluralitas ini tidak dikelola dengan baik, akan bisa menjadi potensi keresahan dan konflik yang melelahkan di tengah masyarakat. Di sinilah dibutuhkan pendekatan dialog yang baik, agar bisa memberi kesejukan bagi umat, sehingga bisa memperkokoh keutuhan dan persatuan bangsa. ❑ - g

*) ***Dr Hamdan Daulay MA,***
*Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

## Pikiran Pembaca

**Pikiran Pembaca** terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email *pikiranpembaca@gmail.com*. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

## *Bangunan Tahan Gempa*

**DALAM** waktu relatif singkat, di tahun 2016 telah terjadi gempa dengan skala sedang/besar di New Zealand, Jepang, Kepulauan Solomon, beberapa wilayah di Indonesia dan negara lain.

Kemudian yang membuat terkejut adalah terjadinya gempa Aceh, Rabu, 7 Desember 2016 pagi, dan beberapa hari kemudian masih ada gempa lagi yang terjadi di San Fransisco dan di Hutubi Tiongkok.

Kejadian gempa ini harus membuat sadar bahwa kita memang tinggal di wilayah rawan gempa (baca Analisis *KR* tentang gempa yang disampaikan oleh Prof Sarwidi, *KR*, 8/12-16 dan Dr Jaya Murjaya, *KR*, 9/12-16).

Siapapun tidak mungkin dapat mencegah terjadinya gempa, tapi masih mungkin untuk membuat 'bangunan tahan gempa'. Membuat bangunan tahan gempa adalah usaha untuk melindungi penghuni dari keruntuhan bangunan akibat gempa.

Beberapa langkah praktis untuk membuat bangunan tahan gempa yaitu pertama, buatlah perencanaan bangunan dan perancangan struktur yang mengacu pada peraturan bangunan yang berlaku (SNI Beban, SNI Beton, SNI Baja, SNI Gempa). Ini berlaku untuk bangunan kecil/sederhana (*non engineered structure*) maupun bangunan besar/-bertingkat (*engineered structure*).

Kedua, sebelum pembangunan uruslah IMBB/IMB. Perencanaan dan perancangan bangunan yang sudah dibuat akan diperiksa/dievaluasi oleh tim ahli struktur yang ada dalam Dinas Perizinan masing-masing daerah (Pemkot/Pemda). Apabila dijumpai adanya perencanaan/perancangan yang tidak/belum memenuhi syarat teknis bangunan tahan gempa, tentu akan diberitahu agar diperbaiki keandalan strukturnya.

Ketiga, kerjakan pembangunan yang baik dan benar secara teknis dengan kualitas bahan yang bermutu dan memenuhi syarat tahan gempa (Prof Sarwidi beberapa kali memberi pelatihan kepada mandor bangunan tentang pelaksanaan dan detailing bangunan tahan gempa).

Keempat, untuk mencegah penyimpangan pembangunan dari rencana bangunan yang diajukan dalam IMBB/IMB, Pemkot/Pemda masih mewajibkan warga yang setelah selesai membangun untuk mengurus Sertifikasi Laik Fungsi ( SLF). Untuk diketahui saja bahwa pembangunan yang menyimpang dari IMBB/IMB dan atau salah dalam pelaksanaan dapat membahayakan bangunan miliknya dari efek gempa.

Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) Komda Yogyakarta memberi konsultasi gratis tentang bangunan tahan gempa, baik yang sudah eksis, sedang dibangun maupun yang masih dalam tahap perencanaan. HAKI juga rutin setiap tahun menyelenggarakan seminar/-*shortcourse* tentang gempa. Kegiatan ini untuk selalu mengingatkan kepada pelaku jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi akan adanya bahaya gempa yang suatu saat dapat saja melanda bangunan miliknya. ❑ - g

***Ir Benny Puspantoro MSc A-Ut***
*An Pengurus HAKI Komda Yogyakarta*
*HP: 08164221748 / 087808784869.*

## *Pertemuan Anggota 'Sekar Jagad'*

**PAGUYUBAN** Pesona Batik Indonesia 'Sekar Jagad' bekerja sama dengan Royal Ambarrukmo Yogyakarta akan mengadakan pertemuan rutin anggota bulan Desember 2016 yang diisi pameran batik, bazar batik hasil kegiatan pelatihan anggota Sekar Jagad dan jogedan, Sabtu, 17 Desember 2016, pukul 09.00 sampai selesai di Pendapa Royal Ambarrukmo, Jl Adi Sucipto No 81 Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan seluruh anggota hadir dan bagi yang belum menerima undangan, pengumuman ini berlaku sebagai undangan. ❑ - g

***Dra Murtiningsih W***
*An Pengurus.*

## Pojok KR

'Gunungan' Sedekah Raja untuk masyarakat.
**-- Semoga Raja selalu kaberkahan.**

***

Kapolri: pengamanan Natal, Densus 'all out'.
**-- Damai di hati, damai di bumi.**

***

RI-India sepakat investasi farmasi, TI dan otomotif.
**-- Lha, film Bollywood dan sinetron?**

Berabé

Kedaulatan Rakyat

**SIUPP** (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
**Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
**Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
**Penerus:** Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi.
**Komisaris Utama:** Drs HM Romli. **Direktur Utama:** dr Gun Nugroho Samawi.
**Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH.
**Direktur Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

**Pemimpin Umum:** dr Gun Nugroho Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Litbang Diklat Redaksi:** Wismoko Poernomo, **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Sihono HT, H Soeparno S Adhy, Drs Widyo Suprayogi, Dra Esti Susilarti MPd, Yon Haryono Hadi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Herry Sugito, Drs Jayadi K Kastari, Sutopo Sgh, M Arief Budiarto, Subchan Mustafa, Sulistyo Sutopo, Drs Hasto Sutadi, Eko Boediantoro, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H Chaidir, M Sobirin, Linggar Sumukti, Agung Purwandono, Riyana Ekawati SIKom, Wahyu Priyanti SH, Ardhi Wahdan SPdi, **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Franz Boedi Sukarnanto, Surya Adi Lesmana, Bambang Nurcahya. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Purwanto Hening Widodo BSc, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan :** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40 - 42 Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**
**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Alfons Suhadi, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
**Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792, 8448622. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP, Wakil Kepala Biro : Sukaryono BA .
**Surakarta :** Jalan Bhayangkara No.13, Surakarta 57141, Telp/Fax (0271) 718015. KepalaPerwakilan: Dra Hermin Lestari, Kepala Biro: Qomarul Hadi.
**Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244/Fax (0281) 621797. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Kepala Biro : Edhi Romadhon.
**Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Kepala Biro : Sri Warsiti .
**Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, 362502 . Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
**Purworejo :** Jalan Veteran Blok A Kav. 6, Purworejo Plaza, Telp/Fax (0275) 321848. Kepala Perwakilan: Suprapto SPd, Kepala Biro: Gunarwan.
**Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suyatno, Kepala Biro: R Agussutata.
**Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562, 394707. Kepala Perwakilan: Subardi, Kepala Biro: Y Agus Waluyo .

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.